

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama dakwah yang menyeru umatnya untuk senantiasa berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Persoalan yang pertama kali timbul dalam Islam bukanlah persoalan keyakinan melainkan politik.¹ Permasalahan yang terjadi dalam Islam sebagai agama dakwah terkait dalam hal politik semakin berkembang pada masa Khulafaur Rosyidin. Pada masa tersebut sistem pengangkatan khalifah bukan atas hubungan darah melainkan atas dasar pengangkatan dengan mendapat persetujuan dan pengakuan umat yang dalam istilah Arabnya *bay'ah*.²

Demikian menurut sejarah Islam tidak terlepas dari persoalan politik dan perkembangan politik juga tidak terlepas dari adanya pemanfaatan fungsi pengorganisasian yang merupakan salah satu bentuk fungsi manajemen. Pengorganisasian dapat menjadi langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya.³ Fungsi pengorganisasian sangat penting dalam menghubungkan politik dengan dakwah sehingga dapat meningkatkan produktivitas kader partai.

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta : UI Pers, 2001), hlm. 88.

² Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 108.

³ Ahmad Fadli, *Organisasi dan Administrasi*, (Kediri : Manhalun Hasyim Pers, 2002), hlm. 30.

Pengorganisasian dakwah merupakan cara koordinasi untuk menghimpun dan mengatur Sumber Daya Manusia yang dimiliki ke dalam suatu kerangka struktur dan hubungan menurut pola tertentu sehingga dapat melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴ Di dalam suatu organisasi maupun partai politik sangat diperlukan salah satu fungsi manajemen yaitu pengorganisasian dakwah yang dapat dirumuskan sebagai serangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi.⁵ Aktivitas penyelenggaraan organisasi dakwah semakin kompleks, hal ini dikarenakan masalah-masalah yang akan dihadapi dakwah akan semakin bertambah banyak sesuai dengan akses kemajuan informasi, teknologi, dan perkembangan zaman. Berbagai kompleksitasnya permasalahan yang terjadi, kelemahan dakwah lebih banyak dalam hal pengorganisasian dan manajemen.⁶

Dewasa ini demokrasi di Indonesia tidak mungkin terlepas dari adanya partai politik, dimana partai politik merupakan wadah aspirasi rakyat yang nantinya akan disalurkan melalui kelembagaan. Demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan yang merata yaitu dengan keadilan sosial. Keadilan sosial sangat penting karena patokan islam adalah kaidah fiqh yaitu langkah-langkah kebijaksanaan para pemimpin

⁴ Zaini Muchtarom, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Al-Amin dan IKFA, 2001), hlm. 15-16.

⁵ A. Rosyad Shaleh, *Manajemen Da'wah Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 88.

⁶ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 177.

mengenai rakyat yang dipimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat dan pembelaan terhadap yang benar, hal ini menjadi salah satu tujuan dakwah.⁷ Partai politik pengemban amanah yang diserukan dan untuk atas kepentingan masyarakat. Salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang di dalam kegiatan politiknya juga terdapat nilai-nilai dakwah. Fungsi pengorganisasian sangat penting dalam menghubungkan politik dengan dakwah sehingga terjadi suatu koordinasi di dalam partai politik tersebut. Koordinasi yang dimaksud dalam hal ini tidak lain adalah suatu proses hubungan antara suatu kegiatan dakwah yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan dilakukan oleh partai politik. Dengan adanya pengorganisasian dakwah, maka rencana dakwah menjadi mudah pelaksanaannya, dimana kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan partai politik akan dibagi-bagi ke dalam tugas-tugas yang lebih terperinci sehingga tugas-tugas tersebut akan memudahkan bagi pendistribusian tugas kepada para pelaksana sehingga setiap pelaksana lebih jelas dengan tugas yang diamanahkannya.⁸

Selain itu, pengorganisasian dakwah juga dapat meminimalisir akumulasi pekerjaan yang akan menyebabkan proses penyelenggaraan dakwah menjadi tidak kondusif.⁹ Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik di Indonesia dan sebagai suatu wadah kegiatan proses penyelenggaraan aktivitas dakwah

⁷ AM. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), hlm. 88-89.

⁸ A. Rosyad Shaleh, *Manajemen Da'wah Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 90.

⁹ *Ibid*, hlm. 88.

membutuhkan pengorganisasian yang mengandung koordinasi terpadunya berbagai kemampuan, keahlian masing-masing komponen. Pengorganisasian juga memudahkan dalam menentukan pemilihan tenaga pelaksana dakwah yang semuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditentukan dengan tujuan untuk membantu permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Aktivitas pengorganisasian dakwah yang dilakukan oleh suatu partai politik terdiri dari beberapa langkah tindakan, antara lain spesialisasi kerja, departementalisasi, dan rentang kendali. Semua aktivitas pengorganisasian yang telah disebutkan tidak lain untuk menumbuhkan pendalaman terhadap tugas-tugas dalam penyelenggaraan dakwah. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa manajemen dakwah mengenai studi tentang pengorganisasian dakwah sangat penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan dakwah dalam suatu organisasi dakwah.

Oleh karena itu, dari uraian pembahasan di atas mendorong penulis untuk tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Fungsi Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Kinerja Partai Dakwah (Studi Deskriptif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan bahwa inti permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Fungsi Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Kinerja Partai Dakwah di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan dan analisis, pokok permasalahan itu dirinci dalam tiga permasalahan penelitian:

1. Bagaimana Spesialisasi Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Partai Dakwah di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana Departementalisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Partai Dakwah di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana Rentang Kendali Dalam Meningkatkan Kinerja Partai Dakwah di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah dicantumkan dalam rumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Spesialisasi Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Partai Dakwah di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.
- b. Untuk Mengetahui Departementalisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Partai Dakwah di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.
- c. Untuk Mengetahui Rentang Kendali Dalam Meningkatkan Kinerja Partai Dakwah di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan menjadi perangsang untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan ilmu manajemen khususnya manajemen organisasi politik Islam, dan menjadi sumbangan pemikiran dan bahan diskusi serta acuan dalam pengembangan ilmu manajemen organisasi politik Islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai organisasi politik atau partai politik, khususnya Partai Keadilan Sejahtera, serta

memberikan pengetahuan dan motivasi kepada seluruh umat muslim yang berminat dibidang ilmu manajemen organisasi politik Islam.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan tentang Pengorganisasian Dakwah

a. Pengertian Pengorganisasian Dakwah

Ahmad Fadli, pengorganisasian dakwah adalah suatu langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya dalam sebuah kegiatan dan menghasilkan sebuah organisasi sehingga dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang kuat.¹⁰

Sondang P. Siagian, pengorganisasian adalah suatu kegiatan menentukan, mengelompokan dan mengatur berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan, menugasi orang-orang dalam kegiatan ini dengan menetapkan factor-faktor lingkungan fisik sesuai, dan menunjukan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.¹¹

¹⁰ Ahmad Fadli, *Op. Cit*, hlm. 30.

¹¹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 37.

Indriyo Gitosudarmo, pengorganisasian adalah suatu system yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitas.¹²

Zaini Muchtarom, dalam buku dasar-dasar manajemen dakwah menyatakan bahwa organisasi dakwah merupakan alat pelaksanaan dakwah agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien, maka pengorganisasian dakwah berarti menghimpun dan mengatur sumber daya maupun tenaga kerja ke dalam suatu kerangka struktur serta hubungan menurut pola tertentu sehingga dapat melakukan kegiatan dakwah bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³

Menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi pengorganisasian dakwah adalah seluruh proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁴

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian pengorganisasian dakwah maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengorganisasian dakwah merupakan suatu langkah tindakan maupun

¹² Indriyo Gitosudarmo, *Perilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta : BPFE, 2000), hlm. 2.

¹³ Zaini Muchtarom, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Al-Amin dan IKFA, 2001), hlm. 17.

¹⁴ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Op.Cit*, hlm. 117.

aktivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi.

b. Bentuk-bentuk Pengorganisasian Dakwah

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat diperlukan dalam menentukan suatu langkah tindakan kerjasama masing-masing anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun bentuk-bentuk pengorganisasian dakwah menurut M. Munir dan Wahyu ilaihi meliputi:

1. Spesialisasi Kerja (Pembagian Kerja)

Spesialisasi kerja menurut Stephen P. Robhins adalah tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah (pembagian kerja).¹⁵

Sedangkan M. Munir dan Wahyu Ilaihi mendefinisikan spesialisasi kerja sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu menjadi lebih baik jika pekerjaan tersebut dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah dan tiap langkah diselesaikan oleh individu yang berlainan.¹⁶

¹⁵ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Op.Cit*, hlm. 120.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 121.

Rasulullah selain berfungsi sebagai nabi dan rasul yang terakhir dengan rendah hati mengetakan bahwa segala sesuatu yang diketahuinya terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diketahuinya terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita memerlukan spesialisasi kerja karena keterbatasan pengetahuan manusia.¹⁷

Firman Allah dalam surat Al-anam ayat 132 yang artinya *“tiap-tiap orang mempunyai derajat (tingkatan) menurut pekerjaan masing-masing”*. Selanjutnya dalam surat Bani Israil ayat 84 *“katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut yang disukainya”*

Ayat-ayat diatas menunjukkan perlunya spesialisasi kerja karena keterbatasan ilmu pengetahuan manusia.¹⁸ Persoalan yang dihadapi dalam zaman modern semakin kompleks sehingga spesialisasi sangat diperlukan baik dalam organisasi maupun dalam penempatan anggota pada suatu jabatan.

Bentuk bentuk spesialisasi dalam organisasi dapat dibedakan menjadi :

a. Organisasi Garis

Dalam bentuk organisasi ini menjelaskan bahwa kekuasaan pimpinan langsung kepada kepala bagian dan kemudian kepada karyawan bawahannya.

¹⁷ Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986, hlm. 132.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 175.

Masing-masing bagian berdiri sendiri dan kepala bagian menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan di bagiannya.

b. Organisasi Garis dan Staf

Bentuk ini merupakan kombinasi pemberdayaan yaitu adanya pengawasan langsung dan spesialisasi dalam organisasi. Tugas kepala bagian yang berat dibantu oleh spesialis yang dapat memberikan saran-saran kondusif atas beberapa fungsi untuk maksud ini bias dbentuk sebuah jajaran staf.

c. Organisasi Fungsional

Pada bentuk ini masing-masing kepala bagian adalah spesialis dan para bawahan masih dikendalikan oleh beberapa pimpinan. Pemimpin memiliki wewenang penuh menjalankan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, bentuk ini lebih menekankan pembagian fungsi. Adapun keuntungan organisasi fungsional, antara lain:

1. Masing-masing fungsi dipegang ahli dalam bidangnya sehingga ada keselarasan antara tugas dan keahlian.
2. Koordinasi internal yang sederhana.
3. Mengembangkan keahlian dan spesialisasi serta jalur yang jelas.

d. Organisasi Komite

Organisasi komite merupakan asas brainstorming (arah pendapat antara berbagai unit fungsional dalam aktifitas organisasi). Fungsi organisasi ini sebagai sebuah forum untuk bertukar pikiran diantara para anggota.

e. Organisasi Matriks

Bentuk pengorganisasian ini merupakan perluasan serta pengejawantahan dari struktur organisasi garis dan staf. Organisasi ini biasa disebut dengan organisasi manajemen proyek, yaitu struktur pengorganisasian yang spesialisasi antar bagiannya dipadukan untuk melaksanakan aktivitas tertentu.¹⁹

2. Departementalisasi Dakwah (Pengelompokan Kerja)

Setelah unit kerja dakwah dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja, maka selanjutnya pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang diklasifikasikan melalui departementalisasi sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara bersama-sama dan dapat dikoordinasikan. Ibnu Syamsi mengungkapkan departementalisasi sebagai pengelompokan tugas ke dalam unit kerja.²⁰

Menurut Sutarto yang dimaksud dengan departementalisasi atau departemenisasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan disertai bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu.²¹

¹⁹ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Op.Cit*, hlm. 124.

²⁰ Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen ed. Revisi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 16.

²¹ Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1998), hlm. 66.

Joseph L. Massie mengemukakan bahwa departementalisasi sebagai suatu cara membagi aktivitas dan membentuknya dalam kelompok khusus yang pada umumnya dinamakan sebagai departementalisasi.²² Tujuan membagi dalam departemen-departemen adalah untuk mengkhususkan aktivitas, menyederhanakan tugas-tugas para manajer dan menegakkan pengawasan.

Dari pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa pada intinya pembagian kerja atau penelompokan kerja yang dikenal dengan istilah departementalisasi yaitu pembagian kerja para anggota dalam organisasi yang berfungsi agar masing-masing anggota dapat dikoordinasi dengan baik.

Manfaat pembagian kerja (departementalisasi), antara lain:

- a. Membantu memperingati tugas koordinasi unit-unit kerja yang terpisah dan tidak sama.
- b. Memperlancar pengawasan dengan menempatkan seorang kepala atau pimpinan yang berkompeten dalam setiap organisasi politik.
- c. Pembagian tugas dalam pekerjaan atas dasar keahlian dan pengetahuan yang bersifat khusus dalam organisasi.

²² Joseph L. Massie, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 76.

- d. Menghemat biaya karena dengan pembagian tugas pekerjaan dan pengelompokan dalam unit-unit kerja tidak akan terjadi kerangkapan tugas yang berakibat kerangkapan biaya.²³

3. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Urgensi konsep rentang kendali dalam pengorganisasian dakwah adalah dapat menentukan jumlah tingkatan dan kuantitas manajer yang dimiliki oleh organisasi dakwah.²⁴

Faktor yang mempengaruhi rentang kendali antara lain:

1. Kesamaan Fungsi

Semakin banyak kesamaan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentang semakin melebar (artinya semakin banyak bawahan yang dapat dipimpin dan diawasi dengan baik).

2. Kedekatan Geografis

Semakin dekat letak penempatan kerja secara fisik, rentang semakin melebar.

²³ Ibnu Syamsi, *Op.Cit*, hlm. 19.

²⁴ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Op.Cit*, hlm. 128

3. Tingkat Pengawasan Langsung

Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan rentangan semakin melebar.

4. Tingkat Koordinasi Yang Dibutuhkan

Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar.

5. Perencanaan Yang Dibutuhkan Manajer

Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan pimpinan, rentangan semakin melebar.

6. Bantuan Organisasional

Bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi.²⁵

2. Tinjauan Tentang Partai Politik Dakwah

a. Pengertian Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip dari Miriam Budiarjo mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan

²⁵ Ibnu Syamsi, Op.Cit, hlm. 24-25.

penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.²⁶

Menurut R.H. Soltau sebagaimana dikutip dari Miriam Budiarmo mendefinisikan bahwa partai politik sebagai berikut:

A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies

(Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka).²⁷

Menurut Miriam Budiarmo dalam buku Sistem Politik Indonesia mengemukakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.²⁸

Sigmund Neuman dalam karangannya Modern Political Parties mengemukakan definisi sebagai berikut:

A political party is the articulate organization of society's active political agents those who are concerned with the control of governmental power

²⁶ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 160

²⁷ Ibid, hlm. 161.

²⁸ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 102.

and who compete for popular support with another group or groups holding divergent news.²⁹

(Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

b. Peran dan Fungsi Partai Politik

Secara umum, aktivitas partai politik ini adalah dakwah, amar makruf dan nahi munkar. Namun, lebih spesifik, dalam konteks sistem pemerintahan, fungsi dan peranan partai politik ini adalah untuk melakukan *check and balance*. Bisa juga disebut fungsi dan peran *muhasabah li al-hukkam* (mengoreksi penguasa). Inilah fungsi dan peranan yang dimainkan oleh partai politik Islam ini dalam negara.

Adapun fungsi lain dari partai politik diantaranya adalah:

1) Partai sebagai komunikasi politik

Yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat dapat berkurang.

2) Partai sebagai sarana sosialisasi politik

²⁹ Miriam Budiarmo, Op.Cit, hlm. 162

Yaitu mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader dan kursus penataran.

3) Partai politik sebagai sarana recruitment politik yaitu parpol

Berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment).

4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management)

Yaitu partai politik berusaha mengatasi suasana persaingan dan perbedaan pendapat di masyarakat.³⁰

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan efisien maka diperlukan langkah-langkah yang sistematis pula. Adapun langkah-langkah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.538 A Bandung 40286.

³⁰ Ibid, hlm. 163-165.

Alasan diadakan penelitian dilokasi tersebut antara lain:

- a) Karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian.
- b) Karena di lokasi tersebut tersedia berbagai sumber data yang dibutuhkan pada saat penelitian.

b. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dimana data-data diperoleh dari lapangan, buku-buku, observasi, hasil wawancara, catatan lapangan, dan arsip-arsip dokumen resmi. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan diperiksa kembali demi tercapainya kesesuaian dari apa yang diteliti.

Sedangkan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian dengan memusatkan perhatian pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya, kemudian melakukan representasi obyektif dengan mendeskripsikan gejala-gejala data atau fakta sebagai adanya representasi data dengan diiringi pengolahan agar dapat diberikan penafsiran.³¹

³¹ Hadiri dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1999), hlm. 74.

c. Sumber Data

Data penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan objek yang sedang dikaji. Adapun penulis mengklasifikasikan sumber-sumber data tersebut sebagai berikut :

a. Sumber data primer, ialah sumber yang dijadikan objek penelitian yaitu (informan) antara lain :

1. Sekretaris Umum DPW PKS Provinsi Jawa Barat
2. Bidang Politik dan Hukum
3. Bidang Pembinaan Wilayah
4. Masyarakat sekitar DPW PKS Provinsi Jawa Barat

b. Sumber data sekunder, ialah sumber lain yang membantu atau pelengkap dari sumber primer yang berfungsi untuk mengembangkan data dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

- Buku-buku yang terkait dengan pengorganisasian dakwah partai politik
- Data- data berupa arsip dan dokumen penting yang berkaitan dengan pengorganisasian dakwah partai politik

d. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yaitu cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data.³² Untuk membantu pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya yaitu:

a. Observasi Partisipatory

Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis fenomena yang diselidiki.³³ Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi berstruktur dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis ke lokasi penelitian di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.

Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana fungsi pengorganisasian dakwah dalam meningkatkan kinerja pengurus di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.

b. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden.³⁴

Teknik ini dilakukan penulis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan pertanyaan kepada informan sudah

³² Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 134.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* : Jilid 2 (Yogyakarta : Andy Offset, 1986), hlm. 134

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* : Jilid 2 (Yogyakarta : Andy Offset, 1986), hlm. 134

dipersiapkan tetapi cara penyampaiannya dilangsungkan secara bebas dan terikat oleh pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umum dalam melakukan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data menggunakan dokumen sebagai sumber data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar yang ada kaitannya dengan masalah yang hendak diteliti dengan cara melihat dan mengamati langsung.³⁵

Penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data tentang kondisi umum daerah penelitian dan data-data yang masih ada kaitannya dengan pengorganisasian dakwah.

e. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif analitik yaitu metode yang digunakan di dalam suatu penelitian dengan cara mengumpulkan, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis sehingga berdasarkan data itu dapat ditarik pengertian-pengertian serta kesimpulan.

³⁵ Ibid, hlm. 95

Dalam penelitian ini, analisa yang akan digunakan penulis adalah analisa kualitatif, dengan maksud setiap data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan atau mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta menyusunnya kedalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- 2) Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis yang sesuai dengan topik penelitian.

